

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DALAM
MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN
KENDAL**

**AFSIH LISANI DINISTI
(DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN FISIP UNDIP)**

Abstract: The Role Of Kendal Regency Government In Organizing Non Formal Education As An Effort To Improve Quality Of Human Resources In Kendal Regency.

Kendal Regency is one of the areas in Central Java province with high poverty levels. The high levels of poverty in Kendal caused by the quality of Human Resources is low. While the low quality of Human Resources in Kendal is influenced by education level of society. The education level of the community in Kendal regency is dominated by people with a category not/do not complete primary school. From that problem is need for follow-up in the fulfillment of public education throughout life. One of the efforts undertaken by the Government of Kendal is the issuance of District Regulation Kendal No. 10 of 2012 on the Management and Delivery of Education, where education in Kendal not only be done through formal education (schools), but also through non-formal education. This research focuses on the role of Kendal Regency Government in organizing non formal education as an effort to improve quality of human resources in Kendal Regency.

The type of research is qualitative descriptive. Data obtained from the primary and secondary data, using purposive sampling techniques for the selecting informants. Data collection techniques used were in-depth interviews and documents study.

The results showed that the role of the Government of Kendal in organizing non-formal education as an effort to improve the quality of human resources in Kendal are the organizers, meaning that the Government of Kendal is a party to arouse, encourage, facilitate, and manage ideas and activities development in the community in the field of non-formal education. Implementation of these roles are divided into three phases: preparation, implementation, and evaluation. However there are several factors that constraint, the first is financial and the second is is the human resource in this regard is the non formal education teachers.

The writer given to the Kendal Regency Government and the people who follow non-formal education in Kendal. For Kendal Regency Government should provide more support on non formal education of organizing in order to become a partner level with formal education. As for the people who follow non-formal education in Kendal should be able to utilize the facilities provided by the Government of Kendal wisely, because such facilities as an opportunity to improve the quality of society.

Keywords: Role of Government, Non-Formal Education, Human Resources

Abstraksi: Peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kendal.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kendal disebabkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah. Sedangkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Kendal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kendal didominasi

oleh penduduk dengan kategori tidak/belum tamat SD/MI dan tamatan SD/SDLB/MI. Dari permasalahan tersebut perlu adanya tindak lanjut dalam pemenuhan pendidikan masyarakat sepanjang hayat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kendal tidak hanya ditempuh melalui pendidikan formal (sekolah), tetapi juga melalui pendidikan non formal (PNF). Penelitian ini fokus pada peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyelenggarakan pendidikan non formal sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kendal.

Tipe penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pemilihan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyelenggarakan pendidikan non formal sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kendal adalah sebagai organisator (*organizer*), artinya Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan pihak yang membangkitkan, mendorong, memfasilitasi, dan mengelola ide-ide serta kegiatan pembangunan di tengah masyarakat di bidang pendidikan non formal. Pelaksanaan peran tersebut dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Namun ada beberapa faktor yang menjadi kendala, yaitu pertama adalah dana dan yang kedua adalah sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga pengajar pendidikan non formal.

Saran dari penulis diberikan untuk Pemerintah Kabupaten Kendal dan masyarakat yang mengikuti pendidikan non formal di Kabupaten Kendal. Untuk Pemerintah Kabupaten Kendal hendaknya memberikan dukungan lebih pada penyelenggaraan pendidikan non formal agar bisa menjadi partner sejajar dengan pendidikan formal. Sedangkan untuk masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal secara bijak, karena fasilitas tersebut sebagai peluang masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kesejahteraan hidupnya.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pendidikan Non Formal, Sumber Daya Manusia

Pendahuluan

Kabupaten Kendal merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kendal disebabkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah. Sedangkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Kendal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kendal didominasi oleh penduduk dengan kategori tidak/belum tamat SD/MI dan tamatan SD/SDLB/MI. Dari permasalahan tersebut perlu adanya tindak lanjut dalam pemenuhan pendidikan masyarakat sepanjang hayat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kendal tidak hanya ditempuh melalui pendidikan formal (sekolah), tetapi juga melalui pendidikan non formal (PNF). Penelitian ini fokus pada peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyelenggarakan pendidikan non formal sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kendal.

Tinjauan Teoritis

1. Peran Pemerintah

Pada hakikatnya kata peran lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya peran adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peran pemerintah dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap persiapan, pemerintah mempunyai peran dalam menghimpun isu-isu strategis yang ada di masyarakat, membuat kebijakan, dan menentukan program-program yang akan dilaksanakan. Pada tahap persiapan pemerintah juga berperan sebagai regulator, karena pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelayanan melalui kebijakan yang dibuatnya. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, pemerintah berperan sebagai pelaksana dari pelayanan tersebut. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai dinamisor yang menggerakkan program-program yang telah disusun dan direncanakan tersebut melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan tersebut diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Dalam tahap ini pemerintah juga berperan sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pelayanan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan melalui pemberian bantuan kepada masyarakat. Kemudian pada tahap evaluasi, pemerintah mempunyai peran dalam melakukan evaluasi dan membuat laporan mengenai pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat tersebut.

Ketetapan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan mereka. Hal tersebut sangat diperlukan demi pencapaian target atau tujuan yang maksimal. Setiap institusi dan aparatur birokrasi harus menyadari dan mampu menganalisa bagaimana kondisi masyarakat, untuk selanjutnya menentukan peran, metode, tindakan dan membuat kebijakan yang tepat dengan kondisi tersebut. Kondisi sosial masyarakat terbagi dalam tiga fase tahapan perkembangan, yakni Masyarakat Terbelakang (*Underdeveloped Community*), Masyarakat yang mulai membangun (*developing community*), dan Masyarakat Mandiri (*self-developed community*).

2. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal merupakan salah satu jalur pendidikan di samping pendidikan formal (pendidikan di sekolah) dan pendidikan informal (pendidikan di keluarga). Jalur pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat.

Pendidikan non formal mempunyai fungsi membelajarkan individu atau kelompok agar mampu memberdayakan dan mengembangkan dirinya sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan/perkembangan zaman. Berdasarkan fungsi tersebut pendidikan non formal dapat melayani kebutuhan pendidikan suplemen, pendidikan komplemen, pendidikan kompensasi, pendidikan substitusi, pendidikan alternatif, pendidikan pengayaan, pendidikan pemutakhiran (updating), pendidikan/pelatihan keterampilan, pendidikan penyesuaian, dan pendidikan pembibitan.

Kebutuhan akan pendidikan seperti itu disalurkan melalui program-program pendidikan non formal, antara lain pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan masyarakat.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pemilihan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen.

Pembahasan

1. Peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kendal

Pemerintah Kabupaten Kendal menyelenggarakan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kendal. Peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyelenggarakan pendidikan non formal di Kabupaten Kendal adalah menjadi organisator (*organizer*), artinya Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan pihak yang membangkitkan, mendorong, memfasilitasi, dan mengelola ide-ide serta kegiatan pembangunan di tengah masyarakat di bidang pendidikan non formal dan pelaksanaan peran tersebut dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dalam menjalankan perannya, Pemerintah Kabupaten Kendal membentuk satuan pendidikan yang didalamnya memuat program pendidikan non formal. Satuan pendidikan non formal yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kendal tersebut adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan Desa Vokasi. Sedangkan penyelenggaraan program pendidikan non formalnya itu pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan anak usia dini. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kendal juga membentuk Taman Bacaan Masyarakat sebagai sarana belajar masyarakat di Kabupaten Kendal. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kendal juga mendistribusikan bantuan keuangan kepada satuan pendidikan non formal tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyelenggarakan pendidikan non formal sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kendal tersebut sudah dapat dikatakan berhasil. Karena dengan adanya peran pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyelenggarakan pendidikan non formal maka tingkat pendidikan masyarakat menjadi lebih baik, selain itu juga menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kendal menjadi meningkat. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia tersebut, masyarakat menjadi lebih sejahtera dan taraf kehidupannya pun meningkat.

2. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kendal

Dalam menjalankan perannya, Pemerintah Kabupaten Kendal mempunyai kendala dalam menyelenggarakan pendidikan non formal di Kabupaten Kendal. Faktor penghambat yang pertama adalah dana, dan faktor kedua adalah sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga pengajar pendidikan non formal.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyelenggarakan pendidikan non formal sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kendal adalah sebagai organisator (*organizer*), artinya Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan pihak yang membangkitkan, mendorong, memfasilitasi, dan mengelola ide-ide serta kegiatan pembangunan di tengah masyarakat di bidang pendidikan non formal. Pelaksanaan peran tersebut dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap persiapan,

pelaksanaan, dan evaluasi. Namun ada beberapa faktor yang menjadi kendala, yaitu pertama adalah dana dan yang kedua adalah sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga pengajar pendidikan non formal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yang perlu dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kendal
 - a. Pemerintah Kabupaten Kendal perlu mencari dana tambahan dengan melakukan penggalangan dana yang dapat dilakukan dengan pengumpulan buku bekas yang dapat disalurkan ke TBM dan sebagian dapat lelang ke pihak ketiga untuk mendapatkan dana. Selain itu juga dapat dibebankan pada masyarakat setempat yang dirasa mampu untuk memberikan bantuan;
 - b. Pemerintah Kabupaten Kendal hendaknya memberikan dukungan lebih pada penyelenggaraan pendidikan non formal agar bisa menjadi partner sejajar dengan pendidikan formal (pendidikan di sekolah);
 - c. Pemerintah Kabupaten Kendal perlu mencari tenaga pendidik dengan melibatkan lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan seperti Aisyiah, Muslimat Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menempatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kabupaten Kendal, dimana program kerjanya mengutamakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat.
2. Bagi Masyarakat yang mengikuti pendidikan non formal
 - a. Masyarakat yang mengikuti pendidikan non formal harus mampu memanfaatkan bantuan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal secara bijak, karena bantuan dan fasilitas tersebut sebagai peluang masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kesejahteraan hidupnya;
 - b. Masyarakat diharapkan mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara menghilangkan rasa malas dalam belajar, karena pendidikan itu penting bagi kehidupan mereka dan sebetulnya tidak ada kata terlambat dalam belajar untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Daftar Pustaka

I. BUKU

- Djojohadikusumo, Sumitro. (1991). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Danim, Sudarwan. (1995). *Transformasi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- El Muhtaj, Majda. (2008). *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadiyanto. (2004). *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Hadari. (1992). *Perundang-undangan Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiyono, Budi. (2012). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung: NUANSA.
- Sihombing, Umberto. (1999). *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan*. Jakarta: PD Mahkota.
- Soelaman, Joesoef. (1992). *Konsep Dasar Pendidikan non formal*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sudomo, M. (1989). *Pendidikan Luar Sekolah ke Arah Pengembangan Sistem Belajar Masyarakat*. Jakarta: Dirjen Dikti, Depdikbud.
- Suryono, Agus. (2004). *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Suryono, Agus. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Administrasi Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Tilaar, H.R. (1997). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Tjiptoherijanto, Prijono. (1982). *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.

II. JURNAL

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2

Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 6, No. 1

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan UUD 1945

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015

IV. INTERNET

www.kendalkab.go.id (diakses pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 09.32 WIB)